



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 900/333/BPKAD/2020
Tanggal : 26/03/2020

No. Koreksi : 76

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Yayat

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DTIY 26/03/2014:08



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG



**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjualan barang milik daerah, perlu dilakukan penentuan nilai penjualan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian;
- b. bahwa penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan nilai limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Wali Kota sebagai dasar penetapan nilai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Wali Kota menetapkan nilai limit/batasan terendah sebagai harga minimal barang yang akan dilelang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD	<i>Am</i>

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor : LAP-0435/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019;
 2. Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor : LAP-0436/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019;
 3. Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor : LAP-0437/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019;
 4. Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor : LAP-0438/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019;
 5. Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor : LAP-0439/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019;
 6. Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor : LAP-0440/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019;
 7. Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor : LAP-0441/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019;
 8. Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor : LAP-0442/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019;
 9. Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor : LAP-0443/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Ah</i>

10. Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor : LAP-0444/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019;
11. Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor : LAP-0445/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019;
12. Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor : LAP-0446/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU.**
- KESATU** : Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan penilaian dan pertimbangan yang dilaksanakan oleh Tim Penilai dan menghasilkan nilai wajar atas objek penilaian.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU

NO	LAPORAN PENILAIAN	RINCIAN BARANG	NILAI WAJAR
1	LAP-0435/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019	338 (tiga ratus tiga puluh delapan) unit Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 14,457,000.00
2	LAP-0436/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019	1 (satu) unit Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp 319,000.00
3	LAP-0437/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019	1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Daihatsu F 600 nomor polisi DN 1756 A	Rp 36,921,000.00
4	LAP-0438/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019	1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Honda NF 125 SD nomor polisi DN 2879 A eks DN 6072 AD	Rp 542,000.00
5	LAP-0439/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019	1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Honda NC12AF2CB1 A/T nomor polisi DN 3697 A	Rp 1,023,000.00
6	LAP-0440/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019	1 (satu) unit Scrap eks Kendaraan Bermotor Suzuki Tornado nomor polisi DN 6349 AC	Rp 155,000.00
7	LAP-0441/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019	1 (satu) unit Scrap eks Kendaraan Bermotor Suzuki Tornado	Rp 155,000.00

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

LAPORAN PENILAIAN		RINCIAN BARANG	NILAI WAJAR	
8	LAP-0442/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019	1 (satu) unit Scrap eks Kendaraan Bermotor Suzuki Smash	Rp	155,000.00
9	LAP-0443/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019	1 (satu) unit Scrap eks Kendaraan Bermotor Honda Kharisma nomor polisi DN 2989 A	Rp	155,000.00
10	LAP-0444/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019	1 (satu) unit Scrap eks Kendaraan Bermotor Toyota Inova E nomor polisi DN 1234 A	Rp	2,117,000.00
11	LAP-0445/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019	1 (satu) unit Scrap eks Alat Berat Isuzu Elf NKR 66	Rp	7,334,000.00
12	LAP-0446/2/2/WKN.16/KNL.03/10.01/2019 tanggal 12 Desember 2019	1 (satu) unit Scrap eks Alat Berat Caterpillar D6R dengan Estimasi Berat 12,000 kg	Rp	36,456,000.00

WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JR</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>